



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10371);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);
20. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
21. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 78).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.

9. Pemerintahan.....

9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah total dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar Rp. 44.589.576.200,- (*Empat puluh empat milyar Lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah*), rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula;

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar Rp. 43.802.252.600,- (*Empat puluh tiga milyar delapan ratus dua juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah*), dihitung berdasarkan jumlah aparatur dan perangkat desa serta anggota BPD dalam wilayah kabupaten Simeulue.

Pasal 4

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar Rp. 787.323.600,- (*Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari kantor Badan/Dinas terkait yang berwenang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan statistik, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;

b. 40%.....

- b. 40% (empat puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin desa;
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah luas wilayah desa; dan
- d. 40% (empat puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis desa;

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 6

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue.

Pasal 7

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan per caturwulan (empat bulan) sesuai dengan penerimaan Kas Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD caturwulan pertama (Januari s/d April 2023) dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Qanun Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan ADD Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD catur wulan kedua (Mei s/d Agustus 2023), dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan bulan April 2023.
- (5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD caturwulan ketiga (September s/d Desember 2023) dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan bulan Agustus 2023 dari Kepala Desa.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD mengacu kepada RPJMDesa dan RKPDesa.

Pasal.....

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADD.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa melalui Kepala Seksi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBDesa ditetapkan menjadi Qanun Desa tentang APBDesa.
- (5) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan, wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.

BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue, berupa:
 - a. Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* ADD

(2) Qanun.....

- (2) Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD caturwulan pertama (Januari s/d April 2023) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Mei 2023;
 - b. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD caturwulan kedua (Mei s/d Agustus 2023) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan September 2023; dan
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* ADD caturwulan bulan ketiga (September s/d Desember 2023) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Terdapat Sisa ADD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah;
- (2) Penundaan penyaluran ADD dilakukan terhadap penyaluran ADD 4 (empat) bulan kedua (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran berjalan, apabila :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
 - b. Terdapat sisa ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

(3) Dalam.....

- (4) Dalam hal Sisa ADD di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada 4 (empat) bulan kedua (Mei s/d Agustus), penyaluran ADD 4 (empat) bulan kedua (Mei s/d Agustus) tidak dilakukan.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (6) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau Penggunaan ADD.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.

(4) Bupati.....

- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

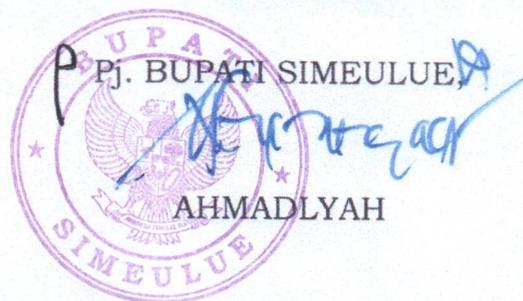
- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

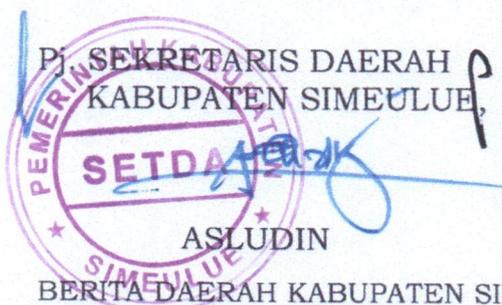
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 13

Lampiran- Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 13 TAHUN 2023
 Tanggal : 13 Maret 2023 M
 20 Sya'ban 1444 H
 Tentang : Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang
 Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian
 Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di
 Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023.

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN SIMEULUE
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
I	SIMEULUE TENGAH		4.910.996.160	64.654.000	4.975.650.160
1		WEL WEL	303.917.280	3.400.000	307.317.280
2		KAMPUNG AIE	359.676.720	5.707.000	365.383.720
3		LAUREE	311.143.920	3.540.000	314.683.920
4		LAMAYANG	303.917.280	4.372.000	308.289.280
5		LAKUBANG	359.676.720	3.751.000	363.427.720
6		LAMBAYA	303.917.280	3.035.000	306.952.280
7		DIHIT	279.650.880	3.695.000	283.345.880
8		LATITIK	303.917.280	3.616.000	307.533.280
9		WELLANGKUM	303.917.280	3.345.000	307.262.280
10		KUTA BARU	303.917.280	3.633.000	307.550.280
11		SEBBE	250.531.200	3.044.000	253.575.200
12		SUAK BARU	279.650.880	3.429.000	283.079.880
13		LUAN SOREP	303.917.280	5.256.000	309.173.280
14		PUTRA JAYA	303.917.280	3.802.000	307.719.280
15		LAUKE	359.676.720	6.630.000	366.306.720
16		SITUFA JAYA	279.650.880	4.399.000	284.049.880
II	SALANG		4.860.090.000	82.413.000	4.942.503.000
17		UJUNG SALANG	335.410.320	4.628.000	340.038.320
18		PADANG UNOI	328.183.680	8.260.000	336.443.680
19		NASREUHE	383.943.120	4.867.000	388.810.120
20		MEUNafa	303.917.280	7.770.000	311.687.280
21		ALONG	303.917.280	4.575.000	308.492.280
22		PANTON LAWE	279.650.880	4.833.000	284.483.880
23		MUTIARA	303.917.280	4.373.000	308.290.280
24		TAMON JAYA	303.917.280	3.445.000	307.362.280
25		KARYA BAKTI	311.143.920	6.472.000	317.615.920
26		JAYA BARU	279.650.880	7.318.000	286.968.880
27		TAMENG	303.917.280	4.269.000	308.186.280
28		LALLA BAHAGIA	279.650.880	4.251.000	283.901.880
29		SUAK MANANG	279.650.880	3.523.000	283.173.880
30		GANANG PUSAKO	279.650.880	2.998.000	282.648.880
31		KENANGAN JAYA	279.650.880	3.720.000	283.370.880
32		BUNGA	303.917.280	7.111.000	311.028.280
III	TEUPAH BARAT		5.547.950.400	97.556.000	5.645.506.400
33		SILENGAS	303.917.280	3.955.000	307.872.280
34		BUNON	279.650.880	4.585.000	284.235.880
35		ANGKEO	359.676.720	5.309.000	364.985.720
36		AWE SEUBAL	328.183.680	6.799.000	334.982.680
37		LAAYON	279.650.880	3.820.000	283.470.880
38		INOR	328.183.680	4.738.000	332.921.680
39		SALUR LASENGALU	279.650.880	6.375.000	286.025.880
40		SALUR LATUN	279.650.880	6.060.000	285.710.880
41		SALUR	279.650.880	5.412.000	285.062.880
42		PULAU TEUPAH	335.410.320	7.307.000	342.717.320
43		AWE KECIL	328.183.680	4.164.000	332.347.680
44		NAIBOS	311.143.920	5.597.000	316.740.920
45		LANTIK	328.183.680	2.981.000	331.164.680
46		LEUBANG HULU	311.143.920	5.403.000	316.546.920
47		LEUBANG	303.917.280	7.994.000	311.911.280
48		SITAL	303.917.280	5.721.000	309.638.280
49		MAUDIL	328.183.680	7.805.000	335.988.680
50		NANCALA	279.650.880	3.531.000	283.181.880

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
IV	SIMEULUE TIMUR		5.538.777.840	133.377.000	5.672.154.840
51		SUAK BULUH	335.410.320	7.346.000	342.756.320
52		AIR DINGIN	320.717.280	12.378.000	333.095.280
53		AMERIA BAHAGIA	311.143.920	4.011.000	315.154.920
54		SUKA JAYA	320.717.280	5.890.000	326.607.280
55		SUKA MAJU	352.210.320	11.213.000	363.423.320
56		SUKA KARYA	369.010.320	16.178.000	385.188.320
57		SINABANG	335.410.320	4.061.000	339.471.320
58		AMAITENG MULIA	279.650.880	3.761.000	283.411.880
59		LUGU	335.410.320	5.800.000	341.210.320
60		SEFOYAN	335.410.320	5.710.000	341.120.320
61		GANTING	328.183.680	11.052.000	339.235.680
62		KUALA MAKMUR	359.676.720	7.013.000	366.689.720
63		UJUNG TINGGI	311.143.920	6.551.000	317.694.920
64		AIR PINANG	352.450.080	10.380.000	362.830.080
65		PULAU SIUMAT	301.437.360	6.016.000	307.453.360
66		KOTA BATU	279.650.880	10.384.000	290.034.880
67		LINGGI	311.143.920	5.633.000	316.776.920
V	TELUK DALAM		3.060.799.440	65.337.000	3.126.136.440
68		BABUSSALAM	301.490.640	3.169.000	304.659.640
69		MUARA AMAN	277.224.240	6.509.000	283.733.240
70		GUNUNG PUTIH	332.983.680	5.018.000	338.001.680
71		LUGU SEBAHAK	335.410.320	6.352.000	341.762.320
72		KUALA BAKTI	311.143.920	4.926.000	316.069.920
73		BULU HADIK	279.650.880	6.178.000	285.828.880
74		SAMBAY	303.917.280	8.125.000	312.042.280
75		LUAN BALU	303.917.280	10.288.000	314.205.280
76		TANJUNG RAYA	303.917.280	5.341.000	309.258.280
77		KUALA BARU	311.143.920	9.431.000	320.574.920
VI	SIMEULUE BARAT		4.719.935.000	122.820.000	4.842.755.000
78		LAYABAUNG	359.676.720	17.766.000	377.442.720
79		SEMBILAN	383.943.120	10.590.000	394.533.120
80		SIGULAI	328.183.680	10.425.000	338.608.680
81		SINAR BAHAGIA	303.917.280	7.592.000	311.509.280
82		LAMAMEK	328.183.680	5.125.000	333.308.680
83		BATU RAGI	359.676.720	6.990.000	366.666.720
84		MALASIN	359.676.720	6.850.000	366.526.720
85		BABUL MAKMUR	303.917.280	6.971.000	310.888.280
86		AMABAAN	352.450.080	13.073.000	365.523.080
87		MITEUM	359.676.720	8.887.000	368.563.720
88		LHOK BIKHAU	311.143.920	6.017.000	317.160.920
89		UJUNG HARAPAN	330.161.480	5.116.000	335.277.480
90		SANGGIRAN	303.917.280	6.448.000	310.365.280
91		LHOK MAKMUR	335.410.320	10.970.000	346.380.320
VII	TEUPAH SELATAN		5.943.866.880	97.667.000	6.041.533.880
92		SENEUBUK	311.143.920	7.504.000	318.647.920
93		SUAK LAMATAN	279.650.880	3.911.000	283.561.880
94		ALUS ALUS	303.917.280	5.913.000	309.830.280
95		BATU RALANG	279.650.880	5.023.000	284.673.880
96		ULUL MAYANG	303.917.280	3.136.000	307.053.280
97		KEBUN BARU	303.917.280	4.471.000	308.388.280
98		BADEGONG	332.983.680	3.431.000	336.414.680
99		LATIUNG	308.717.280	4.739.000	313.456.280
100		PASIR TINGGI	303.917.280	4.222.000	308.139.280
101		LABUHAN JAYA	279.650.880	6.252.000	285.902.880
102		LABUHAN BAJAU	279.650.880	8.442.000	288.092.880
103		BLANG SEBEL	303.917.280	6.017.000	309.934.280
104		ANA AO	328.183.680	5.616.000	333.799.680
105		LATALING	306.290.640	5.043.000	311.333.640
106		PULAU BANGKALAK	335.410.320	6.133.000	341.543.320
107		LABUHAN BAKTI	352.450.080	4.791.000	357.241.080
108		TRANS JERNGE	359.676.720	5.336.000	365.012.720
109		TRANS MERANTI	359.676.720	3.792.000	363.468.720
110		TRANS BARU	311.143.920	3.895.000	315.038.920

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
VIII	ALAFAN		2.651.949.360	42.259.000	2.694.208.360
111		LEWAK	357.250.080	6.125.000	363.375.080
112		LAMEREM	303.917.280	3.671.000	307.588.280
113		LHOK PAUH	359.676.720	5.032.000	364.708.720
114		SERAFON	303.917.280	4.706.000	308.623.280
115		LANGI	303.917.280	6.728.000	310.645.280
116		LUBUK BAIK	359.676.720	6.453.000	366.129.720
117		LHOK DALAM	335.410.320	3.762.000	339.172.320
118		LAFAKHA	328.183.680	5.782.000	333.965.680
IX	TEUPAH TENGAH		3.867.458.640	50.612.000	3.918.070.640
119		MATANURUNG	303.917.280	3.658.000	307.575.280
120		LASIKIN	359.676.720	3.917.000	363.593.720
121		LANTING	303.917.280	2.748.000	306.665.280
122		BUSUNG INDAH	335.410.320	4.621.000	340.031.320
123		KAHAD	311.143.920	3.920.000	315.063.920
124		SIMPANG ABAIL	335.410.320	4.073.000	339.483.320
125		ABAIL	311.143.920	3.944.000	315.087.920
126		NANCAWA	303.917.280	4.364.000	308.281.280
127		LABUAH	279.650.880	3.573.000	283.223.880
128		SUA-SUA	359.676.720	5.491.000	365.167.720
129		BATU-BATU	359.676.720	6.588.000	366.264.720
130		SITUBUK	303.917.280	3.715.000	307.632.280
X	SIMEULUE CUT		2.700.428.880	30.628.600	2.731.057.480
131		BUBUHAN	359.676.720	4.311.000	363.987.720
132		AMARABU	354.823.440	5.432.000	360.255.440
133		KUTA INANG	328.183.680	2.678.600	330.862.280
134		KUTA PADANG	328.183.680	3.776.000	331.959.680
135		SIBULUH	359.676.720	3.615.000	363.291.720
136		LATAK AYAH	335.410.320	2.708.000	338.118.320
137		BORENGAN	299.064.000	3.928.000	302.992.000
138		UJUNG PADANG	335.410.320	4.180.000	339.590.320
JUMLAH TOTAL			43.802.252.600	787.323.600	44.589.576.200

